

## Deteksi Ilusi Fiskal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera

<sup>1</sup>Alfira Fitri Mellizka , <sup>2</sup>Maria Maria, <sup>3</sup>Yuli Antina Aryani

<sup>123</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

alfirafitri6@gmail.com  
mariamardjuki@polsri.ac.id  
yuli\_aa@polsri.ac.id

### **Abstract**

*By employing panel data regression, this study seeks to identify fiscal delusion in provincial governments on Sumatera Island between 2011 and 2020. The research used purposive sampling with an overall of 9 provinces in Sumatera Island. Using the eviews 10 software, a panel data regression approach was utilized to evaluate the data. With two approaches used, the result shows that fiscal illusions is observed through the expenditure-manipulations approach. It is based on the independent and dependent variables' negative correlation. In the revenue enhancement approach, there is no indication of fiscal illusion. In this research, the variable of the Revenue Enhancement approach uses balancing funds (revenue sharing fund, general allocation fund, and special allocation fund). The research was conducted in all provinces in Sumatera Islan within 10 years, while in the other previous research, the Revenue Enhancement approach used balancing funds whose components were not stated in detail, and the study was carried out over a period of fewer than ten years in just one province, city, or district. The implications of this research add to the research materials in the field of Public Sector Accounting and the development of further research. It is concluded that fiscal illusions can be detected with two approaches, but only with the expending-manipulation approach resulting in the indication of fiscal illusions.*

**Keywords:** *Fiscal Illusion, Revenue Enhancement, Expenditure Manipulation*

### **Abstrak**

Penelitian ini mendeteksi ilusi fiskal pada pemerintah provinsi di Sumatera tahun 2011-2020 dengan menggunakan regresi data panel. Penelitian ini dilakukan pada 9 Provinsi di Sumatera. Data dianalisis berbantuan *software eviews 10*. Dengan dua pendekatan, yaitu peningkatan pendapatan dan manipulasi belanja didapatkan hasil bahwa terdeteksi ilusi fiskal melalui pendekatan manipulasi belanja. Pendeteksian tersebut berdasarkan korelasi negatif Rasio dari Pendapatan Nasional yang Diberikan Pemerintah Pusat (Pemerintah Pusat) bagi Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) dan Kepentingan relatif dari DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah terhadap anggaran PAD. Pada pendekatan peningkatan pendapatan tidak terindikasi ilusi fiskal. Pendekatan peningkatan pendapatan menggunakan dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus). Penelitian dilakukan pada seluruh provinsi di Sumatera dalam waktu 10 tahun, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan peningkatan pendapatan yang mana dana perimbangan tidak dirincikan komponennya dan dilakukan hanya pada salah satu provinsi atau kota/kabupaten saja. Implikasi dari penelitian ini, menambah bahan kajian bidang Akuntansi Sektor Publik dan pengembangan penelitian selanjutnya. Temuan penelitian ini, ilusi fiskal dapat dideteksi dengan dua pendekatan namun hanya pendekatan manipulasi belanja yang mengindikasikan terjadinya ilusi fiskal.

**Kata Kunci:** Ilusi Fiskal, Peningkatan Pendapatan, Manipulasi Belanja

## PENDAHULUAN

Wewenang untuk mencari potensi sumber daya telah diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Sumber daya potensial yang dimaksudkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan provinsi di Indonesia masih didominasi oleh dana perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan penerimaan daerah yang selalu dan sebaliknya PAD mengalami penerunan dari tahun ke tahun (Ilmiyyah et al., 2020). Dalam hal lain, pemerintah daerah cenderung tergantung kepada pemerintah pusat, kemudian meningkatkan kemampuan daerahnya melalui peningkatan anggaran belanja daripada mengupayakan peningkatan PAD-nya.

Secara umum, pendapatan pemerintah idealnya memengaruhi tingkat pengeluaran, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan paralel (simetris) antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah, dan bila terdapat hubungan yang tidak paralel (asimetris), dapat dikatakan terindikasi ilusi fiskal. Ilusi fiskal mengacu pada kesalahan persepsi sistematis terhadap parameter fiskal (Dell'Anno & Dollery, 2014) dan pola terkait dari perkiraan pengeluaran dan kewajiban perpajakan, berulang serta konsisten sepanjang waktu dan dapat menimbulkan bias dalam keputusan anggaran disemua tingkat pemerintahan. Ilusi fiskal berdampak negatif pada *shadow economic* (Buehn et al., 2018) dan *shadow economic* secara positif memengaruhi ilusi fiskal. Ilusi fiskal terjadi setiap kali wajib pajak tidak menyadari berapa banyak pajak yang dibayar kepada negara atau berapa banyak kompensasi yang diterimanya dari negara (Dell'Anno & Mourao, 2012a). Penelitian tentang ilusi fiskal penting karena konsep ini sebagai salah satu sumber ketidakpercayaan antara pemerintah dan warganya.

Beberapa penelitian tentang hubungan antara ilusi fiskal dan desentralisasi (Grossman, 1990; B. Dollery & Worthington, 1995, 1999; Dell'Anno & Mourao, 2012b) menyebutkan adanya pemisahan kekuatan perpajakan dan pengeluaran mendistorsi penilaian wajib pajak daerah tentang biaya dan manfaat yang diterima. Di pihak lain, (Abatemarco & Dell'Anno, 2020), ilusi fiskal terbukti menjadi salah satu penentu redistribusi yang disebabkan oleh sistem fiskal progresif.

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam mendeteksi ilusi fiskal, tetapi dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: peningkatan pendapatan dan pendekatan manipulasi belanja. Dalam mendeteksi ilusi fiskal pada pendekatan peningkatan pendapatan dilakukan analisis perbandingan antara pertambahan realisasi belanja daerah dengan realisasi PAD, sedangkan pada pendekatan manipulasi belanja dilihat dari komponen penerimaan terhadap peningkatan anggarannya (Nurhayati, 2017; Ilmiyyah et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mendeteksi adanya ilusi fiskal. Penelitian (Ilmiyyah et al., 2020) menggunakan pendekatan peningkatan pendapatan, manipulasi belanja, dan pemanfaatan utang pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Nurhayati (2017) melakukan penelitian dengan pendekatan peningkatan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon.

Penelitian ini menggunakan teori deteksi ilusi fiskal dan ilusi fiskal. Scholar dalam (Picur 2003; Adi & Ekaristi, 2009), teori deteksi ilusi fiskal menjelaskan mengenai konsep-konsep pendekatan yang dapat dilakukan dalam mendeteksi ilusi fiskal. Konsep ilusi fiskal menjelaskan bahwa pemerintah menyusun laporan keuangannya dengan sedemikian rupa yang dapat mengarahkan pihak lain ke tindakan tertentu (Adi & Ekaristi, 2009).

Penelitian ini memiliki intensi dalam mendeteksi ilusi fiskal melalui pendekatan peningkatan pendapatan dan manipulasi belanja pada pemerintah provinsi di Sumatera. Peneliti berharap dapat menemukan bukti empiris mengenai ilusi fiskal pada pemerintah provinsi di Sumatera.

## METODE PENELITIAN

Analisis kausalitas digunakan untuk mengkaji hubungan terstruktur, faktual, dan akurat antarvariabel independen terhadap variabel dependen dengan uji statistik. Kajian dilakukan terhadap komponen yang memengaruhi terjadinya ilusi fiskal melalui dua pendekatan.

### Sampel

Data keuangan dan non keuangan menjadi sampel penelitian: PAD, dana perimbangan, belanja daerah dan tingkat pengangguran yang diperoleh melalui website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. *Purposive sampling* digunakan dalam menetapkan sampel dengan kriteria:

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi periode 2011-2020 yang telah diaudit dan memuat data PAD, belanja daerah, DBH, DAU dan DAK
- Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per provinsi yang dipublikasikan BPS pada periode 2011-2020.

Berdasarkan kriteria yang ada, dari 10 provinsi di Sumatera tahun 2011 sampai 2020 hanya 9 provinsi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengolahan data. Provinsi tersebut: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung. Dengan demikian, unit observasi (n) sebanyak 90 (9 provinsi dengan periode pengamatan 10 tahun).

### Variabel

- Pendekatan peningkatan pendapatan, memiliki variabel dependen berupa belanja daerah dan variabel independen yang terdiri dari: PAD ( $X_1$ ), DBH ( $X_2$ ), DAU ( $X_3$ ) dan DAK ( $X_4$ )
- Pendekatan manipulasi belanja dengan variabel dependen adalah anggaran PAD dan variabel independen yang terdiri dari: 1/DAU ( $X_1$ ), RDAU/ADAU ( $X_2$ ), 1/ADAU ( $X_3$ ), dan tingkat pengangguran ( $X_4$ ).

### Model Regresi Deteksi Ilusi Fiskal

#### a) Pendekatan Peningkatan Pendapatan

Menurut Gemme, et al. (Adi & Ekaristi, 2009), jika salah satu variabel dependen terhadap variabel independen (belanja daerah) memiliki hubungan negatif, maka terdeteksi ilusi fiskal. Model regresi pendekatan pendapatan merujuk pada penelitian Nurhayati (2017; Dyahningtyas et al. (2019), yaitu:

$$Y = \alpha + 1X_{1t,i} + 2X_{2t,i} + 3X_{3t,i} + 4X_{4t,i} + e.$$

Keterangan:

Y = Belanja daerah

$\alpha$  = Konstanta

t = *time series*

i = *cross section*

$X_1$  = PAD

$X_2$  = DBH

$X_3$  = DAK

$X_4$  = DAU

e = *Standard error*

#### b) Pendekatan Manipulasi Belanja

Korelasi antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  harus negatif signifikan dan  $X_4$  harus positif, agar terdeteksi ilusi fiskal (Utari, 2015; Ilmiyyah et al., 2020). Pendekatan ini menggunakan formula yang diadopsi dari Dollery & Worthington (1996, Adi & Ekaristi, 2009); Ilmiyyah et al. (2020).

$$Y = \delta_0 + \delta_1 X_{1t-1,i} + \delta_2 X_{2t-1,i} + 3X_{3t-1,i} + 4X_{4t-1,i} + e.$$

Keterangan:

Y = Anggaran PAD

$\delta$  = Konstanta

$X_1$  = (1/DAU). Rasio dari Pendapatan Nasional yang Diberikan Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah.

$X_2$  = (RDAU/ADAU), Persepsi Relatif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

$X_3$  = (1/ADAU), Kepentingan relatif dari DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah

$X_4$  = Tingkat pengangguran

e = *Standard error*

Tahapan selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif, uji kelayakan model, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Masing-masing analisis/ uji data dilakukan pada setiap pendekatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Pendekatan Peningkatan Pendapatan

Hasil uji statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Y	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>
<b>Mean</b>	4,7T	2,03T	668M	1,17T	676M
<b>Median</b>	4,06T	1,69T	389M	1,07T	77,1M
<b>Maximum</b>	13,4T	5,76T	3,30T	2,71T	4,40T
<b>Minimum</b>	1,01T	167M	46,3M	380M	17,9M
<b>Std. Dev.</b>	2,65T	1,38T	752M	503M	1,02T
<b>Observations</b>	90	90	90	90	90

Sumber: Data diolah dengan *eviews 10* (2022).

Belanja daerah memiliki mean senilai 4,7T, *median* senilai 4,06T, nilai maksimum 13,4T yang diperoleh Sumatera Utara tahun 2019, dengan nilai minimum sebesar 1,01T pada provinsi Bengkulu (2011) dengan standar deviasi 2,65T. provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 dan nilai minimum 167M diperoleh provinsi Lampung tahun 2012 dan standar deviasi dengan nilai 1,38T.

DBH memiliki nilai mean senilai 668M, *median* senilai 389M, nilai maksimum 3,30T diperoleh provinsi Riau tahun 2014, nilai minimum 46,3M diperoleh provinsi Bengkulu tahun 2019 dengan standar deviasi 752M. Nilai maksimum DBH sebesar 2,71T diperoleh provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019, sedangkan nilai minimum 380M didapatkan oleh provinsi Riau tahun 2011. DAU dengan mean senilai 1,17T, median senilai 1,07T, dan standar deviasi 503M.

DAK dengan nilai maksimum 4,40T diperoleh provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Nilai minimum 17,9M diperoleh provinsi Bangka Belitung tahun 2011. Nilai mean 676M, median senilai 77,1M, dan standar deviasi dengan nilai 1,02T.

### Uji Kelayakan Model

Nilai *probability cross section F*  $0,00 < 0,05$  didapatkan dari hasil uji Chow sehingga FEM adalah model terpilih. Pada tahap selanjutnya dilakukan uji *hausman* dan model yang digunakan adalah model FEM dengan nilai *probability cross section random* sebesar  $0,0017 < 0,05$ . Penulis dapat menyatakan FEM adalah model estimasi terbaik.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam pendekatan peningkatan pendapatan, dilakukan uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Dengan pendekatan peningkatan pendapatan tidak ditemukan masalah multikolinearitas maupun heteroskedastisitas

### Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis ditunjukkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	7,23E+11	4,60E+11	1,57	0,12	
X <sub>1</sub>	0,35	0,26	1,32	<b>0,19</b>	Tidak terjadi Ilusi Fiskal
X <sub>2</sub>	0,03	0,28	0,10	<b>0,92</b>	Tidak terjadi Ilusi Fiskal
X <sub>3</sub>	2,73	0,41	6,67	<b>0,00</b>	Tidak terjadi Ilusi Fiskal
X <sub>4</sub>	0,09	0,15	0,59	<b>0,55</b>	Tidak terjadi Ilusi Fiskal
R-squared		0,94	F-statistic		106,24
Adjusted R-squared		0,93	Prob(F-statistic)		0,00

Sumber: Data diolah dengan *eviews 10* (2022).

Pada tabel 2, nilai F-statistik adalah  $106,24 > 6,39$  (F-tabel) dan nilai probabilitas  $0,00 < 0,05$ . PAD, DBH, DAU dan DAK bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. PAD memiliki nilai t-hitung  $0,19 < 0,05$  dengan koefisien bertanda positif, memiliki arti PAD berkorelasi positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hasil studi ini berbeda dengan kajian Pratami & Dwiranda (2017); Jati et al. (2017); Ilmiyyah et al., (2020), PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

T-hitung pada DBH sebesar  $0,92 > 0,05$  dengan koefisien bertanda positif. Hal ini memiliki arti bahwa DBH berkorelasi positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini bertolak belakang dengan temuan Dude et al. (2014); Dyahningtyas et al. (2019); Ilmiyyah et al., (2020)

DAU memiliki nilai t-hitung  $0,00 < 0,05$  dengan koefisien bertanda positif yang berarti DAU berkorelasi positif signifikan terhadap belanja daerah. Kesimpulannya, apabila DAU mengalami peningkatan maka akan berakibat pada peningkatan belanja daerah. Penerimaan dan belanja daerah memiliki hubungan yang simetris. Hal ini sejalan dengan Dude et al., (2014); Jati et al., (2017); Ilmiyyah et al., (2020). Hasil ini tidak sependapat dengan temuan Dyahningtyas et al. (2019), bahwa DAU tidak signifikan terhadap belanja. Di sisi lain, DAK berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah, dengan nilai probabilitas t-hitung  $0,55 > 0,05$ . Dengan demikian hasil uji hipotesis tidak mengindikasikan adanya ilusi fiskal.

Temuan studi ini sama dengan Jati et al. (2017); Pratami & Dwiranda (2017) bahwa tidak terdeteksinya ilusi fiskal pada kabupaten/kota di Bali. Basis untuk mendeteksi ilusi fiskal, salah satu variabel independen harus memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulannya, pada uji ini tidak terdeteksi adanya ilusi fiskal dengan menggunakan peningkatan pendapatan pada pemerintah provinsi di Sumatera tahun 2011-2020.

## 2) Pendekatan Manipulasi Belanja

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	2,03T	1,00E-24	1,08	1,12E-12	0,22
Median	1,69T	6,46E-25	1,00	9,56E-13	0,21
Maximum	5,76T	6,39E-24	10,00	9,06E-12	0,41
Minimum	167M	6,40E-26	0,04	3,68E-13	0,07
Std. Dev.	1,38T	1,10E-24	0,96	9,59E-13	0,06
Observations	90	90	90	90	90

Sumber: Data diolah dengan *eviews 10* (2022).

Pada tabel 3, Anggaran PAD memiliki nilai rata-rata 2,03T, nilai *median* sebesar 1,69T, nilai maksimum 5,76T pada provinsi Sumatera Utara tahun 2019, nilai minimum sebesar 167M diperoleh oleh Lampung pada 2012 dan standar deviasi sebesar 1,38T dengan jumlah observasi sebanyak 90. Rasio Pendapatan Nasional yang diberikan Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah dengan nilai rata-rata sebesar 1,00E-24, *median* 6,46E-25. Nilai maksimum 6,39E-24 diperoleh provinsi Lampung pada tahun 2012 dan nilai minimum 6,40E-26 diperoleh provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dan standar deviasi dengan nilai sebesar 1,10E-24.

Persepsi Relatif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 1,08, *median* sebesar 1, nilai maksimum sebesar 10 diperoleh Sumatera Utara pada tahun 2012, nilai minimum adalah 0,04 diperoleh oleh provinsi Jambi tahun 2014 dan standar deviasi dengan nilai sebesar 0,96.

Kepentingan relatif dari DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 9,06E-12 pada provinsi Sumatera Utara (tahun 2012), dengan nilai minimum 3,68E-13 oleh Sumatera Utara tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 1,12E-12, *median* sebesar 9,56E-13, dan standar deviasi dengan nilai sebesar 9,59E-13.

Tingkat pengangguran mendapatkan nilai maksimum sebesar 0,41 yang diperoleh oleh provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020, sedangkan nilai minimum 0,07 didapatkan oleh provinsi Lampung tahun 2019. Variabel tingkat pengangguran mendapatkan nilai rata-rata sebesar 0,22, *median* sebesar 0,21, dan standar deviasi dengan nilai 0,06.

### Uji Kelayakan Model

Model dari hasil dari uji Chow adalah FEM dengan nilai *probability cross section*  $F$   $0.00 < 0.05$ . Model FEM merupakan hasil uji *hausman* dengan nilai *probability cross section random* sebesar  $0.00 < 0.05$ . Penulis dapat menarik satu benang merah bahwa model estimasi terbaik pada uji kelayakan model adalah FEM.

### Uji Asumsi Klasik

FEM sebagai model estimasi terbaik, maka uji yang dilakukan adalah uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Dalam pendekatan ini tidak terjadi masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	2,97E+12	2,11E+11	14,07	0,00	
X1	-2,26E+35	5,24E+34	-4,31	0,00	Terjadi Ilusi Fiskal
X2	3,85E+11	1,10E+11	3,50	0,00	Tidak terjadi Ilusi Fiskal
X3	-4,61E+23	1,19E+23	-3,88	0,00	Terjadi Ilusi Fiskal
X4	-2,77E+12	8,75E+11	-3,16	0,00	Tidak terjadi Ilusi Fiskal
R-squared	0,95	F-statistic	117,89		
Adjusted R-squared	0,94	Prob(F-statistic)	0,00		

Sumber: Data diolah dengan *evIEWS 10* (2022).

Nilai F-statistik sebesar  $117,89 > 6,39$  (F-tabel) dengan probabilitas  $0,00 < 0,05$ . Rasio Pendapatan Nasional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Persepsi Relatif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Kepentingan relatif DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah, tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap anggaran PAD dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Rasio Pendapatan Nasional yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah memiliki nilai t-hitung  $0,00 < 0,0$ . Ini memiliki arti bahwa Rasio dari Pendapatan Nasional yang

diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berkorelasi negatif dan signifikan terhadap anggaran PAD. Semakin rendah rasio DAU, maka anggaran PAD akan semakin meningkat. Hasil kajian ini tidak sependapat dengan penelitian Adi & Ekaristi (2009); Ilmiyyah, et al. (2020) yang menyatakan bahwa variabel Rasio dari Pendapatan Nasional yang Diberikan Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran PAD.

Persepsi Relatif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berkorelasi positif signifikan terhadap anggaran PAD dengan probabilitas t-hitung sebesar  $0,00 < 0,05$  dan memiliki koefisien positif. Hal ini memiliki arti tingkat keefektifitasan penggunaan DAU yang diberikan meningkat, maka anggaran PAD akan meningkat. Temuan ini bertentangan dengan hasil kajian Adi & Ekaristi (2009) bahwa Persepsi Relatif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terhadap anggaran PAD memiliki hubungan negatif dan juga sejalan dengan penelitian Ilmiyyah et al. (2020).

Nilai probabilitas t-hitung Kepentingan relatif dari DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah sebesar  $0,00 < 0,05$  dengan koefisien bertanda negatif yang berarti bahwa kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja Pemerintah Daerah berkorelasi negatif dan signifikan. Nilai kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja Pemerintah Daerah memiliki makna, semakin berkurang tingkat ketergantungan pemerintah terhadap DAU berarti semakin meningkat anggaran PAD-nya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Adi & Ekaristi (2009); Ilmiyyah et al. (2020).

Tingkat pengangguran berhubungan negatif signifikan terhadap anggaran PAD dengan nilai probabilitas t-hitung  $0,00 < 0,05$  dan koefisien bertanda negatif. Ini dapat diartikan bahwa dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran pada setiap provinsi di Indonesia, maka kontribusi masyarakat dalam meningkatkan anggaran PAD-nya semakin baik.

Ilusi fiskal terindikasi dengan ditandai adanya hubungan negatif dan signifikan pada Rasio dari Pendapatan Nasional yang Diberikan Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah dan Kepentingan relatif dari DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Adi & Ekaristi (2009); Ilmiyyah et al. (2020).

## SIMPULAN

Pendekatan peningkatan pendapatan tidak mengindikasikan adanya ilusi fiskal karena tidak ada satupun komponen yang memiliki korelasi negatif signifikan terhadap belanja daerah. Pada pendekatan manipulasi belanja terdeteksi adanya ilusi fiskal yang ditandai adanya korelasi negatif dan signifikan antara rasio pendapatan nasional yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kepentingan relatif DAU untuk belanja pemprov terhadap anggaran PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abatamarco, A., & Dell'Anno, R. (2020). Fiscal illusion and progressive taxation with retrospective voting. *Economic and Political Studies*, 8(2), 246–273. <https://doi.org/10.1080/20954816.2020.1728831>
- Adi, P. H., & Ekaristi, P. D. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.21002/jaki.2009.01>
- Buehn, A., Dell'Anno, R., & Schneider, F. (2018). Exploring the dark side of tax policy: an analysis of the interactions between fiscal illusion and the shadow economy. *Empirical Economics*, 54(4), 1609–1630. <https://doi.org/10.1007/s00181-017-1277-7>
- Dell'Anno, R., & Dollery, B. E. (2014). Comparative fiscal illusion: A fiscal illusion index for the European Union. *Empirical Economics*, 46(3), 937–960. <https://doi.org/10.1007/s00181-013-0701-x>

- Dell'Anno, R., & Mourao, P. (2012a). Fiscal illusion around the world: An analysis using the structural equation approach. *Public Finance Review*, 40(2), 270–299. <https://doi.org/10.1177/1091142111425226>
- Dell'Anno, R., & Mourao, P. (2012b). Fiscal illusion around the world: An analysis using the structural equation approach. *Public Finance Review*, 40(2), 270–299. <https://doi.org/10.1177/1091142111425226>
- Dollery, B., & Worthington, A. (1995). Federal Expenditure and Fiscal Illusion: A Test of the Flypaper Hypothesis in Australia. *CrossRef Listing of Deleted DOIs*, 25(1), 23–24. <https://doi.org/10.2307/3330654>
- Dollery, B., & Worthington, A. (1999). Fiscal Illusion at the Local Level: An Empirical Test Using Australian Municipal Data. *Economic Record*, 75(1), 37–48. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1999.tb02432.x>
- Dude, D. P., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan dan Fiscal Illusion Pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 29–43.
- Dyahningtyas, R., Suharsih, S., & Astuti, S. R. B. (2019). Kinerja Keuangan Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 119–130. <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5443>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grossman, P. J. (1990). The Impact Of Federal And State Grants On Local Government Spending: A Test Of The Fiscal Illusion Hypothesis. In *Public Finance Quarterly* (Vol. 18, Issue 3). Sage Publications, Inc.
- Ilmiyyah, N. M., Saftiana, Y., & Wahyudi, T. (2020). The empirical analysis of fiscal illusion. *Accounting*, 6(6), 1033–1044. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.016>
- Jati, I. K., Suryanawa, I. K., & Dwirandra, A. (2017). Fiscal Illusion Detection and the Effect on Capital Expenditure, Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Human Development Development Index for District/Cities in Bali Province. *Research Journal of Finance and Accounting ISSN*, 8(10), 161–169.
- Jati, K. I., Suryanawa, K. I., & Dwiranda, A. (2017). Fiscal Illusion Detection and the Effect on Capital Expenditure,. *Research Journal of Finance and Accounting* , 8(10), 161–169.
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42–52. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Deteksi Fiscal illusion dengan Pendekatan Revenue Enhancement Pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2), 109–119. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i2.1425>
- Picur, R. D. (2003). CFO as Budget Magician: Fiscal Illusion in Public Finance. *Governance Finance Review*.
- Pratami, I. N. P. A. A., & Dwiranda, B. N. A. A. (2017). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan, Lpds, Dan Pdrbpada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.2, 1141–1170.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Utari, T. (2015). *Analisis Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Se-Indonesia* [Universitas Islam Indonesia]. <http://hdl.handle.net/123456789/989>
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga*. Ekonesia.